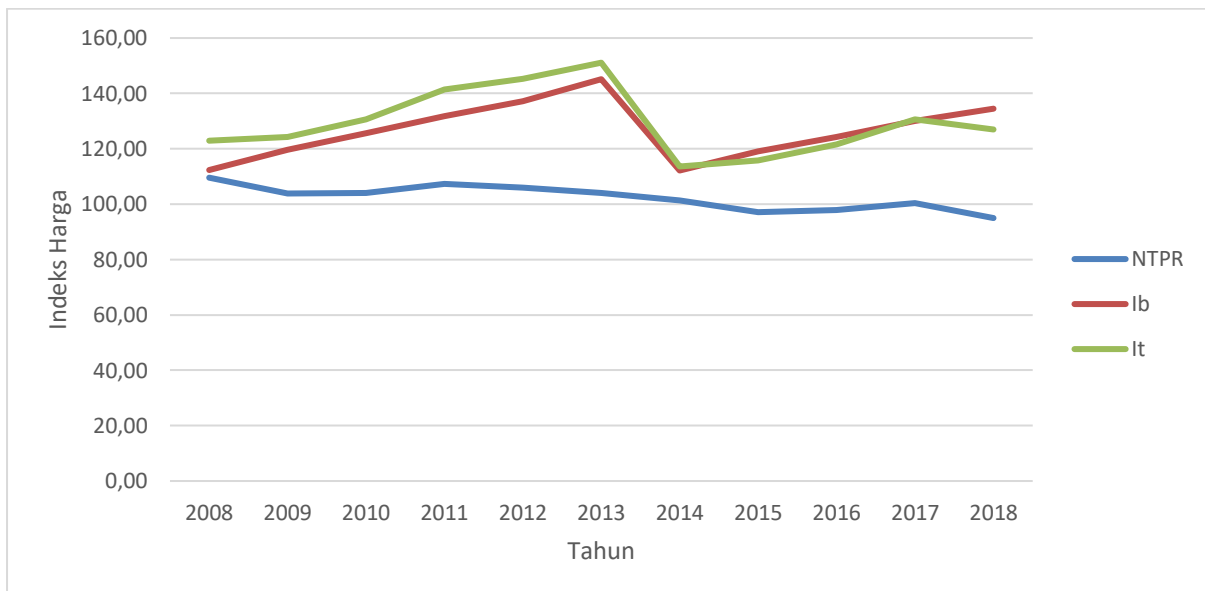


IMPLIKASI PENURUNAN HARGA KOMODITAS PERKEBUNAN TERHADAP NTP PERKEBUNAN RAKYAT

Oleh: Ahmad Syariful Jamil, M.Si
Calon Widyaiswara Ahli Pertama

Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani perkebunan rakyat pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 94.98 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100.38. Dengan kata lain, NTP perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 5.38%. Namun, tren penurunan NTP tidak hanya terjadi pada tahun 2007-2018 saja, Tren penurunan NTP perkebunan rakyat juga terjadi dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Penurunan NTP perkebunan rakyat telah terkoreksi sebesar 13.2 % sejak tahun 2008. Tren penurunan NTP perkebunan rakyat digambarkan pada Gambar 1.



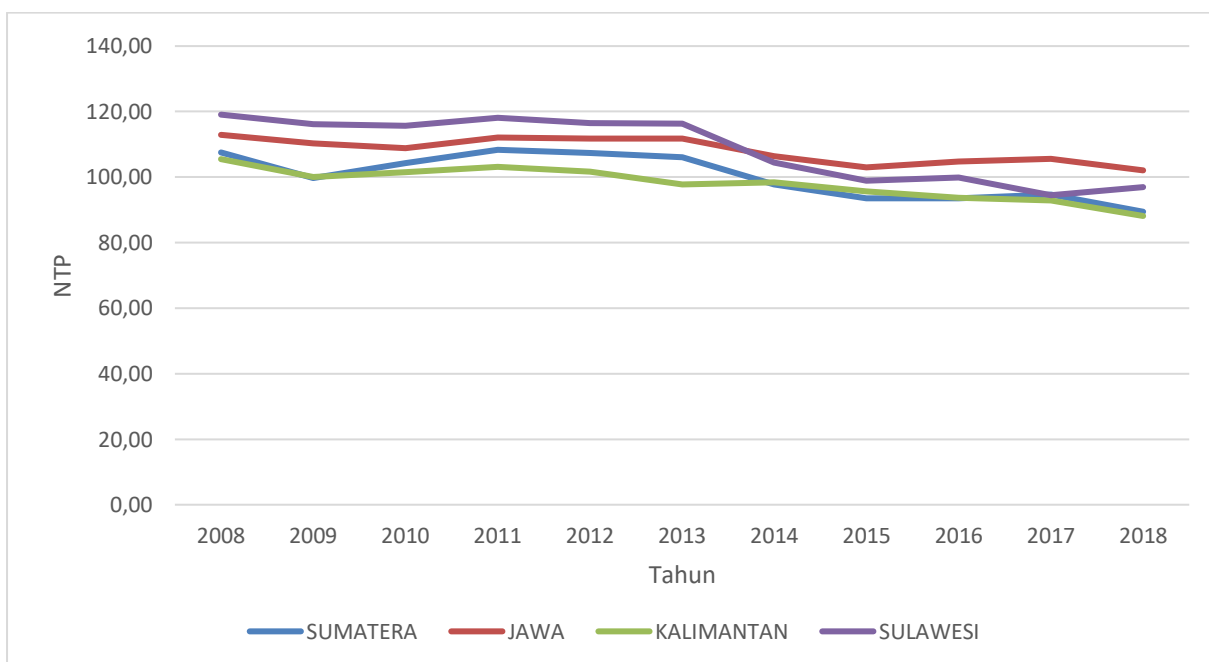
Gambar 1. Perkembangan Ib, It dan NTP perkebunan rakyat dari tahun 2008-2018

Sumber: BPS (2019)

Gambar 1 menunjukkan indeks harga yang diterima petani (It) yang terdiri dari harga dari produk yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat, indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang terdiri dari harga barang-barang konsumsi dan barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian, dan indeks nilai tukar petani perkebunan rakyat selama periode 2008-2018. Gambar 1 juga menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2008-2013 indeks harga

It selalu lebih besar dibandingkan dengan Ib, dan mencapai titik impas pada tahun 2014. Sementara itu, pada kurun waktu 2015-2018, umumnya indeks Ib selalu lebih besar dibandingkan dengan indeks harga It. Kondisi tersebut menyebabkan NTP perkebunan rakyat cenderung berada di bawah 100. Hal ini berarti petani perkebunan rakyat mengalami deficit, dimana kenaikan harga hasil produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Dengan kata lain, pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

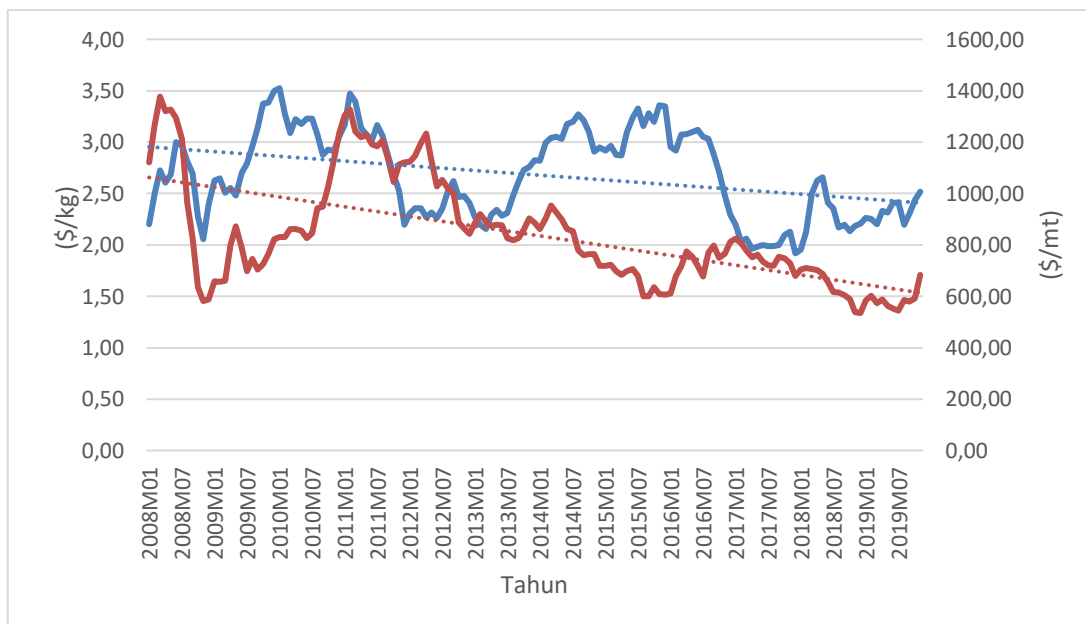
Turunnya nilai tukar petani perkebunan rakyat umumnya diikuti oleh wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Pada artikel ini, penulis merangkum wilayah tersebut kedalam 4 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dalam rangka memberikan gambaran terkait perubahan nilai NTP perkebunan rakyat rata-rata pada wilayah-wilayah tersebut. Penetapan wilayah tersebut didasarkan pada alasan representasi wilayah berbasis perkebunan dan non perkebunan. Dimana Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; dan Jawa masing-masing mewakili wilayah berbasis komoditas perkebunan dan non perkebunan. Dengan kata lain, struktur ekonomi dari wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebagian besar berbasis pada komoditas perkebunan dengan komoditas utamanya adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Perkembangan NTP perkebunan rakyat dari tahun 2008-2018 digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan NTP Perkebunan rakyat berdasarkan wilayah dari tahun 2008-2018

Sumber: BPS (2019)

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai tukar petani perkebunan rakyat secara umum menurun di seluruh wilayah di Indonesia. Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi masing-masing memiliki nilai tukar petani yang deficit pada tahun 2018 yaitu sebesar 89.44, 88.14 dan 96.95. Selain itu, wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan dua wilayah yang mengalami penurunan NTP dari tahun sebelumnya. Sementara itu, wilayah Jawa memiliki nilai tukar petani yang surplus, dimana kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani perkebunan rakyat di Jawa relative lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Perbedaan-perbedaan tersebut khususnya disebabkan adanya perbedaan komoditas yang diusahakan antara wilayah-wilayah tersebut. Dimana wilayah seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi didominasi oleh komoditas yang beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan harga seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Sementara indeks harga yang dibayarkan oleh petani dari tahun-ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kondisi tersebut menyebabkan NTP perkebunan rakyat di tiga wilayah tersebut deficit.

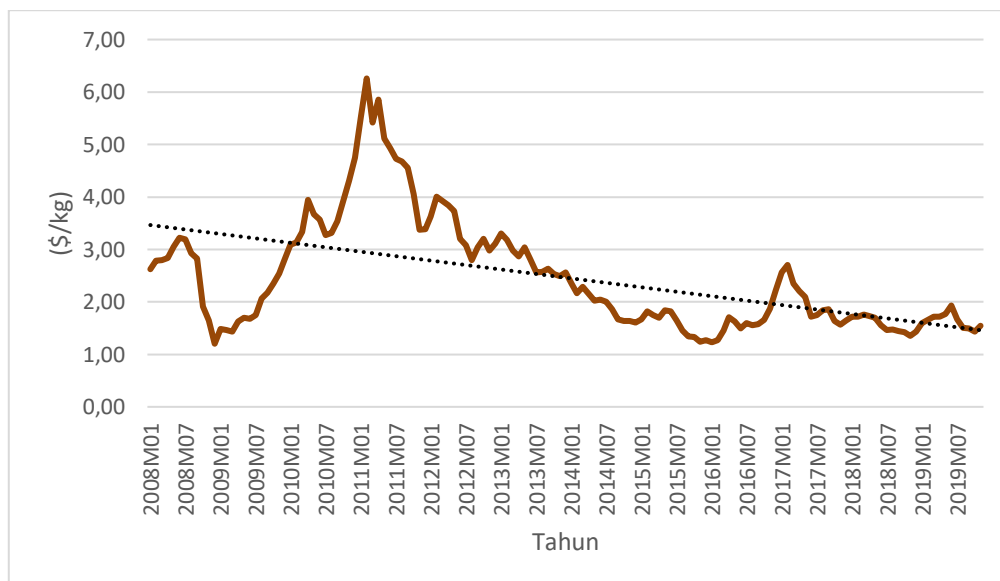


Gambar 3. Perkembangan harga bulanan CPO dan kakao dunia dari Januari 2018 hingga Juli 2019

Sumber: Worldbank 2019

Gambar 3 menggambarkan perkembangan harga bulanan CPO dan kakao dunia dari tahun 2018 hingga Juli 2019. Gambar 3 menunjukkan bahwa baik harga kakao dan CPO secara umum mengalami penurunan pada periode tersebut. Selama periode tersebut harga kakao rata-

rata dunia sebesar \$2.68/kg, dengan standart deviation sebesar 0.4727. Sementara itu, CPO memiliki harga rata-rata sebesar \$838.16/mt, dengan standart deviation sebesar 210.52. Sementara itu, kondisi yang sama juga terjadi pada harga karet dunia (Gambar 4). Secara rata-rata harga karet dunia sebesar \$2.46/kg, dengan standar deviation sebesar 1.08. Ketiga nilai deviasi tersebut mengindikasikan bahwa harga CPO cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan kakao dan karet. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang bergantung pada komoditas kelapa sawit akan mengalami pendapatan yang berfluktuatif. Selain itu, pendapatan tersebut juga akan cenderung menurun selama periode tersebut. Kondisi tersebut sejalan dengan nilai tukar petani yang juga mengalami penurunan.



Gambar 4. Perkembangan harga bulanan karet dunia dari Januari 2008 hingga Juli 2019

Sumber: World Bank 2019

Penurunan harga beberapa komoditas perkebunan tersebut akan selanjutnya secara langsung menyebabkan petani rakyat mengalami keterbatasan fiscal. Dan apabila hal ini tidak dapat diatasi akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan, khususnya pada wilayah dengan struktur ekonomi perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menstabilkan harga komoditas-komoditas tersebut melalui kebijakan yang tepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui hilirisasi dan rekayasa kelembagaan di tingkat petani.

Sumber

Badan Pusat Statistik. 2019. Nilai Tular Petani (NTP). Badan Pusat Statistik [Internet].

Tersedia dari: www.bps.go.id.

World Bank. 2019. World Development Indicator. Washington, D.C.: World Bank.